

GAGASAN SOEMITRO DJOJHADIKOESOEMO PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 1947-1951

Meutia Faiza Ammara¹, Eko Ribawati²

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 2288230066@untirta.ac.id¹, eko.ribawati@untirta.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1947–1951), terutama berkaitan dengan Program Gerakan Benteng yang diinisiasi pada masa Kabinet Natsir (1950–1951). Kajian ini menerapkan Teori pembangunan ekonomi nasional dengan penekanan pada pembentukan kelas pengusaha pribumi dan industrialisasi dasar, sebagaimana dibahas dalam literatur ekonomi serta sejarah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa studi literatur dengan menghimpun dan menelaah sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan gagasan serta kebijakan Soemitro dalam konteks sosial-ekonomi pascakemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Soemitro berfokus pada penguatan pelaku ekonomi lokal, pembangunan industri nasional, serta pembatasan dominasi modal asing melalui kebijakan lisensi impor dan pembiayaan bagi pengusaha dalam negeri. Kesimpulan gagasan tersebut menjadi landasan awal transformasi ekonomi Indonesia yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap modal dan pelaku usaha asing sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi nasional pada era Demokrasi Liberal.

Kata kunci

Ekonomi, Gagasan, Demokrasi Liberal, Rencana Sumitro, Program Banteng

ABSTRACT

This study aims to examine the economic thinking of Soemitro Djojohadikoesoemo during the Liberal Democracy era in Indonesia (1947–1951), especially related to the Benteng Movement Program initiated during the Natsir Cabinet (1950–1951). This study applies the theory of national economic development with an emphasis on the formation of a native entrepreneur class and basic industrialization, as discussed in the economic literature and Indonesian history. The research method used is a literature study by collecting and analyzing primary and secondary sources related to Soemitro's ideas and policies in the post-independence socio-economic context. The results of the study show that Soemitro's thoughts focused on strengthening local economic actors, developing national industries, and limiting the dominance of foreign capital through import licensing policies and financing for domestic entrepreneurs. The conclusion of these ideas became the initial foundation for Indonesia's economic transformation aimed at reducing dependence on foreign capital and business actors while realizing national economic independence in the Liberal Democracy era.

Keywords

Economy, Ideas, Liberal Democracy, Sumitro's Plan, Banteng Program

1. PENDAHULUAN

Periode Demokrasi Liberal (1950–1959) merupakan fase krusial dalam sejarah Indonesia pascakemerdekaan, ditandai oleh instabilitas politik dan tantangan ekonomi yang monumental. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia dihadapkan pada warisan struktur ekonomi kolonial yang didominasi oleh modal asing dan kelompok non-pribumi, sementara mayoritas penduduk pribumi terpinggirkan dari sektor perdagangan dan industri modern. Keadaan ini menuntut adanya gagasan-gagasan radikal dan visioner untuk meletakkan fondasi ekonomi nasional yang mandiri. Di tengah kekacauan politik

dan ekonomi ini, peran individu-individu intelektual dengan visi pembangunan jangka panjang menjadi sangat vital, salah satunya adalah Soemitro Djojohadikoesoemo. (Thee Kian Wie, 2005)

Soemitro Djojohadikoesoemo, yang sering dijuluki "Begawan Ekonomi" Indonesia, memainkan peran sentral dan multiaspek dalam masa kritis tersebut. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan di dalam negeri, tetapi juga mencakup perjuangan diplomasi di panggung internasional. Dua periode penting yang menjadi fokus adalah keterlibatannya dalam delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947 dan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir (1950–1951). Mempelajari gagasan-gagasannya pada rentang tahun 1947–1951 memberikan jendela unik untuk memahami transisi ideologi ekonomi dari struktur kolonial menuju ekonomi nasional.

Setelah kembali ke tanah air dan menjabat menteri, gagasan Soemitro diwujudkan dalam dua program fundamental: Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang dikenal sebagai "Rencana Sumitro" (1951) dan Program Benteng (1950). Kedua kebijakan ini merupakan upaya afirmatif untuk mendekolonisasi struktur ekonomi secara internal. Program Benteng, khususnya, dirancang untuk menciptakan kelas pengusaha pribumi melalui pemberian fasilitas kredit dan lisensi impor khusus. Ini adalah upaya langsung Soemitro untuk melawan dominasi modal asing dan Cina dalam sektor vital ekonomi.

Visi Soemitro mengenai pembangunan ini didasarkan pada keyakinan mendalam akan perlunya transformasi sosial-ekonomi. Seperti yang ditegaskan dalam salah satu kutipan terkenal yang merefleksikan pemikirannya, "Pembangunan ekonomi, pada hakikatnya, adalah proses transformasi yang berlangsung seiring waktu. Proses ini ditandai oleh perubahan struktural, baik pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan sosial masyarakat yang bersangkutan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Soemitro, pembangunan tidak hanya soal angka, tetapi tentang perubahan fundamental dalam komposisi masyarakat dan perekonomian. (Agus Setiawan, 2025)

Meskipun gagasan-gagasan tersebut sangat visioner, implementasinya dihadapkan pada kompleksitas politik dan tantangan sosial. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci:

- 1) Bagaimana pandangan dan gagasan utama Soemitro Djojohadikoesoemo terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan, khususnya dalam menghadapi struktur ekonomi kolonial?
- 2) Bagaimana peran dan perjuangan Soemitro dalam delegasi Indonesia sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947?
- 3) Sejauh mana efektivitas kebijakan Program Benteng dalam menciptakan pengusaha pribumi yang tangguh? Dan
- 4) Sejauh mana pencetus Program Urgensi Perekonomian atau "Rencana Sumitro" berjalan dan mencapai sasaran strategisnya pada tahun 1951?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif pelaksanaan dan implikasi dari gagasan-gagasan Soemitro dalam rentang waktu 1947 hingga 1951. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya historiografi ekonomi Indonesia, khususnya mengenai upaya nasionalisasi dan pembangunan struktur ekonomi pribumi. Selain itu, temuan ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan ekonomi kontemporer di Indonesia yang masih bergumul dengan isu ketimpangan struktural.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis (historical research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode historis dipilih karena topik ini berfokus pada analisis gagasan dan kebijakan seorang tokoh dalam kurun waktu tertentu di masa lampau (1947–1951). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melakukan rekonstruksi peristiwa, menganalisis ideologi di balik kebijakan, dan mengevaluasi dampak historis dari gagasan Soemitro. Kerangka pikir yang digunakan adalah historisisme, yaitu menempatkan gagasan dan kebijakan Soemitro dalam konteks waktu dan kondisi sosial-politik yang melingkupinya, sehingga dapat dihindari penilaian anahronistik terhadap efektivitas program-programnya.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi pustaka (library research) atau dokumentasi. Sumber data dibagi menjadi dua kategori. Sumber primer meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah pada masa Kabinet Natsir (1950–1951), transkrip atau notulen sidang Dewan Keamanan PBB 1947 yang relevan, serta karya-karya orisinal Soemitro seperti buku dan esai yang terbit pada periode tersebut atau yang merefleksikan pemikiran masa itu. Sumber sekunder meliputi biografi resmi dan tidak resmi Soemitro, artikel jurnal akademik mengenai Program Benteng dan Rencana Urgensi Perekonomian, serta buku-buku sejarah ekonomi dan politik Indonesia masa Demokrasi Liberal. Data dikumpulkan melalui katalog digital perpustakaan, repositori institusi, dan arsip daring terpercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama Soemitro Djojohadikoesoemoe kembali menjadi perbincangan ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya merasa emosional setiap kali mendengar kata “PSI”. Namun, bukan Partai Solidaritas Indonesia yang ia maksud, melainkan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Yaitu, partai bersejarah tempat sang ayah pernah aktif dan menjadi tokoh sentral. Siapakah Soemitro Djojohadikoesoemoe, dan bagaimana kiprahnya dalam membangun ekonomi serta politik Indonesia lewat PSI? Berikut penjelasan lengkapnya. (Faisal Irfandi, 2025)

Lahir sebagai intelektual yang menonjol, Soemitro Djojohadikoesoemoe mulai menunjukkan kepiawaiannya di panggung internasional sejak 1946. Dilansir dari Kompas.com (23/02/2022), ia ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di London. Setibanya di tanah air, ia dipercaya menjadi pembantu staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan masuk ke dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI). (Silmi Nurul Utami, 2025)

Tahun berikutnya, pada 1947, Soemitro menjabat sebagai Direktur Utama Banking Trading Center (BTC), sebuah lembaga penting dalam masa transisi ekonomi. Pada 1948, ia kembali dipercaya sebagai delegasi Indonesia untuk sidang PBB di Amerika Serikat, dengan status sebagai wakil ketua misi dan menteri berkuasa penuh di bidang ekonomi.

Gagasan Soemitro terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Di tengah ketegangan global akibat perang dagang Amerika Serikat dan China, para ekonom Indonesia kembali menoleh ke warisan pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Dalam sebuah gala dinner mengenang beliau sebagai guru bangsa dan guru para ekonom, muncul dorongan kuat untuk menjadikan ekonomi kerakyatan dan kemandirian industri sebagai pondasi utama kebijakan ekonomi nasional hari ini.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas dan Chairman of Indonesia Roundtable of Young Economists, Fakhru Fulvian, menilai dinamika trade war saat ini menjadi pemantik penting bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi industrinya. “Dengan

adanya kebijakan trade war ini yang flip-flop ya, kita nggak tahu sampai sekarang, akhirnya trade war ini akan seperti apa,” kata Fakhrol dalam Gala Dinner Soemitro Economics Forum di Hotel The Tribrata, Rabu (4/6).

Ia menilai, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada barang murah impor dan harus mulai membangun batu pijakan baru melalui hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga. Menurutnya, trade war telah mengubah cara pandang banyak negara tentang pentingnya kebijakan industri nasional yang kuat. “Ini akan jadi wake up call karena kita habis ini mungkin mengimpor barang jadi lebih sulit pasca trade war. Good policy datang ketika tertekan,” ujarnya.

Pandangan dan gagasan utama Soemitro Djojohadikoesoemo terhadap pembangunan ekonomi pasca-kemerdekaan berfokus pada perubahan struktural dari ekonomi kolonial yang timpang menjadi ekonomi nasional yang mandiri dan seimbang. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Sumitronomics.

Struktur ekonomi kolonial yang diwarisi Indonesia bercirikan ketidakseimbangan yang parah, di mana sebagian besar kekayaan ekonomi dikuasai oleh pengusaha asing (terutama Belanda) dan kelompok etnis Tionghoa. Soemitro melihat dualisme ekonomi ini sebagai hambatan utama pembangunan. Gagasan-gagasannya bertujuan untuk membongkar struktur ini dengan cara membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkeadilan sosial bagi bangsa Indonesia. (Nicha Muslimawati, 2024)

Perjuangan Soemitro dalam Delegasi Indonesia sidang Dewan Keamanan PBB 1947

Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1947 berlangsung pada 14 Agustus di New York, Amerika Serikat (AS). Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Konflik itu disebabkan oleh Belanda, yang melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947.

Pada Sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, Soemitro Djojohadikoesoemo menjadi salah satu tokoh delegasi Indonesia yang berperan penting memperjuangkan pengakuan dan legitimasi kemerdekaan Indonesia di panggung internasional. Peran Soemitro pada forum tersebut sangat strategis karena ia membawakan suara Indonesia dalam konteks perjuangan melawan agresi militer Belanda yang ingin mempertahankan kekuasaan kolonial.

Ia menggunakan pengetahuan dan kecakapannya dalam diplomasi internasional untuk memaparkan fakta-fakta pelanggaran oleh Belanda serta pentingnya pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Soemitro juga berjuang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyatnya dan upaya Belanda untuk mengambil kembali kendali adalah bentuk agresi ilegal yang tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.

Melalui peran diplomatiknya di Dewan Keamanan PBB, Soemitro berhasil membantu mendapatkan tekanan internasional terhadap Belanda, yang kemudian membuka jalan bagi serangkaian gencatan senjata dan negosiasi politik. Selain perjuangan politik, kehadiran Soemitro memperlihatkan pentingnya peran tokoh ekonomi dan intelektual dalam diplomasi kemerdekaan, bukan hanya tokoh militer atau politik murni. (Lukman Hadi Subroto & Widya Lestari Ningsih, 2022)

Kemampuan Soemitro menyampaikan argumentasi yang kuat didukung analisis ekonomi-politik menjadikan posisi delegasi Indonesia makin dihargai oleh dunia internasional dalam upaya pembelaan hak kedaulatan. Meskipun perjuangan diplomasi berjalan dengan sulit, peran Soemitro dalam sidang tersebut memberi kontribusi strategis terhadap proses pengakuan kemerdekaan dan pembentukan posisi tawar

Indonesia di dunia internasional. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan multidimensi, yakni perjuangan politik, diplomatik, ekonomi, dan sosial yang bersatu padu.

Kebijakan Program Benteng Soemitro

Program Benteng digagas oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Soemitro Djojohadikoesoemo dalam Kabinet Natsir (1950–1951). Program ini dilandasi oleh kesadaran bahwa ekonomi Indonesia masih didominasi oleh pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha etnis Tionghoa dan Belanda, sehingga diperlukan upaya untuk mengubah struktur ekonomi yang timpang. (Anggi Mardiana, 2025)

Program Benteng terdiri dari dua kebijakan, yaitu mengistimewakan importir pribumi dan pemberian kredit modal pada penguasa yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman. Dari kedua kebijakan itu dapat ditemukan inti Program Benteng adalah untuk melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi sekaligus menekan persaingan pengusaha asing dan China. Dalam pelaksanaannya, Program Benteng cukup menarik perhatian minat para pengusaha pribumi. Pada akhir tahun 1950, jumlah importir Benteng baru mencapai 250. (Rahman, 2023)

Lalu, seiring berjalannya waktu, importirnya semakin bertambah. Pada 1952, jumlah importir sudah mencapai 700 perusahaan. Kendati begitu, keberadaan importir pribumi masih sangat minim jika ditinjau dari keseluruhan jumlah importir, yakni 3119 yang mayoritas merupakan orang China. Hal ini lantas menimbulkan dugaan adanya penerima bantuan yang curang. Para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah. (Varelladevanka Adryamarthanino & Tri Indrawati, 2023)

Kondisi ini pula yang menjadi salah satu penyebab Program Benteng berakhir. Alhasil, banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah sukses, yang dikenal dengan istilah “aktentas”. Selain itu, persyaratan kepemilikan modal juga menuai perdebatan karena mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Pada akhirnya, bulan Maret dan April 1957, Kabinet Karya atau disebut juga Kabinet Djuanda menghentikan Program Benteng seiring dengan transisi ke Demokrasi Terpimpin.

Kegagalan Program Benteng terlihat dari beberapa aspek berikut:

- Defisit keuangan negara: Banyak pengusaha pribumi yang menerima bantuan modal ternyata tidak gesit dalam mengelola bisnis mereka. Hal ini menyebabkan keuangan negara mengalami defisit.
- Ketidakmampuan bersaing: Pengusaha pribumi yang baru tidak mampu bersaing dengan pengusaha nonpribumi yang lebih berpengalaman dan mapan.
- Penyimpangan dan penyalahgunaan: Banyak penerima lisensi impor menjual kembali izin tersebut kepada pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan keuntungan instan, alih-alih menggunakannya untuk berbisnis. Praktik ini dikenal sebagai "sistem ali-baba," di mana pengusaha pribumi (ali) hanya bertindak sebagai 'papan nama' bagi pengusaha nonpribumi (baba).
- Tidak mengubah struktur ekonomi: Program ini gagal menggeser dominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan nonpribumi, sehingga struktur ekonomi kolonial tetap bertahan.
- Faktor politik dan administrasi: Kondisi politik yang tidak stabil dengan seringnya pergantian kabinet serta kelemahan administrasi pemerintah menghambat pelaksanaan program. (Sukainah, 2016)

Meskipun demikian, ada sedikit dampak positif yang dihasilkan:

- Tumbuhnya segelintir pengusaha tangguh: Meskipun jumlahnya sedikit, beberapa pengusaha pribumi berhasil memanfaatkan program ini dengan baik dan berkembang menjadi pengusaha besar yang tangguh.
- Pemicu nasionalisasi: Kegagalan program ini mempercepat nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Program Benteng tidak efektif dalam menciptakan kelas pengusaha pribumi yang mandiri dan kompetitif dalam skala besar. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kelemahan internal pengusaha, penyalahgunaan fasilitas, hingga kondisi politik dan administrasi yang tidak mendukung. Program ini pada akhirnya lebih banyak menimbulkan kerugian finansial negara daripada menciptakan kemandirian ekonomi yang diharapkan. (Reny Y. Sinaga, 2022)

Program Urgensi Perekonomian Kebijakan “Rencana Sumitro”

Rencana Sumitro, yang dicetuskan pada April 1951, merupakan program urgensi perekonomian yang dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi pasca-kemerdekaan dengan pendekatan industrialisasi dan modernisasi yang terencana. Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Program Benteng dan berfokus pada pembangunan industri dasar nasional seperti baja, pupuk, dan kimia guna mengurangi ketergantungan impor bahan industri penting.

Sumitro juga mengundang pakar ekonomi internasional, seperti Hjalmar Schacht, untuk memberi masukan dalam proses perencanaan ekonomi, menandai keterbukaan pada integrasi pengetahuan global untuk kemajuan nasional. Rencana Sumitro menekankan peran besar negara sebagai pengendali kebijakan ekonomi serta pemberi fasilitas pada industri dasar yang strategis untuk menjamin kemandirian produksi.

Kebijakan ini secara khusus juga menyoroti pentingnya pengembangan koperasi dan penguatan sektor tradisional sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pengimplementasian Rencana Sumitro menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan modal, infrastruktur, dan kendala politik yang mempengaruhi kesinambungan program.

Selain itu, perbedaan pandangan di level pemerintahan dan birokrasi menyebabkan beberapa aspek rencana sulit terlaksana secara optimal, sehingga perkembangan industrialisasi berjalan lambat. Meski begitu, Rencana Sumitro membuka paradigma baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menempatkan industri nasional dan peran negara sebagai prioritas, serta memperkuat kerangka nasionalisme ekonomi.

Secara keseluruhan, Rencana Sumitro menjadi pionir kebijakan ekonomi yang berorientasi jangka panjang dan memberikan fondasi konseptual penting bagi tahap awal pembangunan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan. (Binti Nikmatur, 2024)

4. KESIMPULAN

Soemitro Djojohadikoesoemoe (Ayah dari Presiden Prabowo Subianto) adalah seorang intelektual dan ekonom terkemuka yang memainkan peran sentral dalam peletakan dasar pembangunan ekonomi dan diplomasi politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Kariernya dimulai di panggung internasional sejak 1946 sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di London dan kemudian di AS pada 1948. Secara politik, ia aktif di Partai Sosialis Indonesia (PSI), menjadikannya tokoh yang identik dengan perjuangan politik dan diplomasi non-militer. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, peran Soemitro sangat strategis karena ia menggunakan kecakapannya

dalam diplomasi ekonomi-politik untuk menekan Belanda dan mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional selama masa Agresi Militer I.

Gagasan-gagasan ekonomi Soemitro, yang dikenal sebagai Sumitronomics, berfokus pada perubahan struktural dari ekonomi kolonial yang timpang menjadi ekonomi nasional yang mandiri, seimbang, dan berkeadilan sosial. Ia melihat adanya dualisme ekonomi kolonial yang didominasi oleh pengusaha asing (Belanda) dan etnis Tionghoa sebagai hambatan utama pembangunan. Warisan pemikirannya, yang menekankan pada ekonomi kerakyatan dan kemandirian industri, kini kembali relevan di tengah dinamika perang dagang global. Para ekonom modern memandang pemikiran Soemitro sebagai "wake up call" bagi Indonesia untuk mempercepat hilirisasi dan membangun kebijakan industri nasional yang kuat, mengurangi ketergantungan pada impor barang murah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan. (2025). *KELAMPAUAN, KEKINIAN DAN HARI DEPAN: Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955-2025*.
- Anggi Mardiana. (2025, May 22). *Apa itu Sumitro Plan? Ini Latar Belakang, Tujuan dan Penyebab Kegagalannya*. Katadata. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/682d5965bb31d/apa-itu-sumitro-plan-ini-latar-belakang-tujuan-dan-penyebab-kegagalannya>
- Binti Nikmatur. (2024, October 22). *Mengenal Prof Sumitro Djojohadikusumo, Ayah Prabowo Subianto dan Ekonom Berpengaruh Berpengaruh*. *Jatimtimes.Com*. Binti Nikmatur Artikel ini telah tayang di *JatimTIMES.com* dengan judul "Mengenal Prof Sumitro Djojohadikusumo, Ayah Prabowo Subianto dan Ekonom Berpengaruh". Baca selengkapnya di: https://jatimtimes.com/baca/323441/20241022/174000/mengenal-prof-sumitro-djojohadikusumo-ayah-prabowo-subianto-dan-ekonom-berpengaruh?utm_source=perplexity Copyright © 2025 *JatimTIMES*.
- Faisal Irfandi. (2025, June 25). *Siapa Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto?* BBC NEWS INDONESIA. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2klyk113ro>
- Lukman Hadi Subroto, & Widya Lestari Ningsih. (2022, April 23). *Delegasi Indonesia di Sidang Dewan Keamanan PBB Tahun 1947*. *KOMPAS.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/23/110000579/delegasi-indonesia-di-sidang-dewan-keamanan-pbb-tahun-1947#:~:text=Pada%20Sidang%20Dewan%20Keamanan%20PBB,Masih%20Dilakukan%20Setelah%20Indonesia%20Merdeka>
- Nicha Muslimawati. (2024, June 4). *Gagasan Soemitro Bisa Lindungi Ekonomi RI dari Perang Dagang-Dinamika Global*. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/gagasan-soemitro-bisa-lindungi-ekonomi-ri-dari-perang-dagang-dinamika-global-25CfdGxea2V/full>
- Rahman, A. (2023). *SISTEM EKONOMI GERAKAN BENTENG PADA MASA ORDE LAMA*. In *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*.
- Reny Y. Sinaga. (2022). *An Interpretive and Critical Paradigm Study of the "Gerakan Ekonomi Benteng" in Indonesia*.
- Silmi Nurul Utami. (2025, July 21). *Sejarah PSI era Soemitro Djojohadikoesoemoe*. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2025/07/21/113752669/sejarah-psi-era-soemitro-djojohadikoesoemoe?page=all>

- Sukainah. (2016). KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG DAN DAMPAKNYA DI SURABAYA TAHUN 1950-1955. In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 4, Issue 3).
- Thee Kian Wie. (2005). *Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*.
- Varelladevanka Adryamarthanino, & Tri Indrawati. (2023, October 9). *Inti Kebijakan Program Benteng*. KOMPAS.Com.
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/09/190000579/inti-kebijakan-program-benteng-#:~:text=Program%20Benteng%20terdiri%20dari%20dua,mengalami%20kesulitan%20dalam%20memperoleh%20pinjaman>